

Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Muhammad Zainul Arifin

Hendra Sukmana

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari 2024

Pendahuluan

1

- Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi Negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya Masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan.

2

Program ketahanan pangan bertujuan untuk pemulihan ekonomi setelah adanya wabah Covid 19 yang mengakibatkan perekonomian di Indonesia menurun, Pemerintah mewajibkan setiap Desa melaksanakan program ketahanan pangan dengan menggunakan Dana Desa sebesar minimal 20 % dari Dana Desa (Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021)

3

- Kondisi Geografis Desa Sumorame menjadi salah satu faktor Kendala dalam pelaksanaan program ketahanan pangan.

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- undang-undang nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan Gizi.
- Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
- peraturan Menteri keuangan nomor 190/PMK 07/2021 Tentang pengelolaan Dana Desa .
- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022.
- peraturan Bupati Sidoarjo nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

PERMASALAHAN



Pemerintah Desa kesulitan dalam penyaluran anggaran sebesar 20 % dari Dana Desa karena lahan pertanian yang terbatas.



Masyarakat belum biasa mengelola keuangan dengan baik, sehingga masih membutuhkan bantuan dari Aparatur desa.



Lahan pertanian masih sering terendam banjir karena sarana dan prasarana irigasi Sungai yang kurang memadai.



Pada bantuan perikanan mengalami kesulitan pada proses penjualan hasil panen



Pada program pemanfaatan lahan sempit berupa bantuan hidroponik setelah dikalkulasi hasilnya kurang maksimal dikarenakan biaya operasionalnya yang besar.

Data Anggaran Ketahanan Pangan

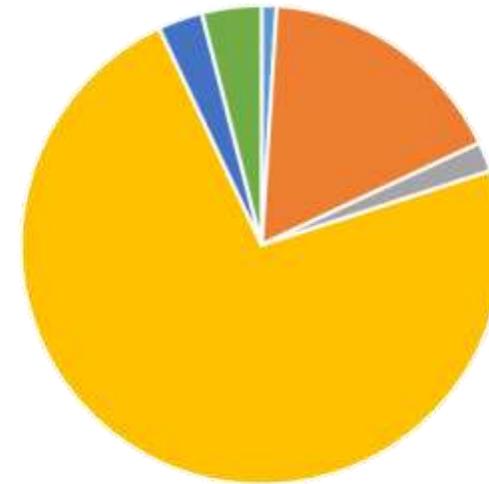
Anggaran APBDes tahun 2022
Rp 227.222.810,88



97 %

- Bantuan Perikanan Rp 17.638.400
- Bantuan Bibit Pertanian Rp 45.625.900
- Bantuan obat pertanian Rp 57.756.770
- Pemberdayaan Rp 77.430.475
- Sarpras Pertanian Rp 21.606.100
- Silpa Rp 7.165.165,88

Anggaran APBDes Tahun 2023
Rp 257.687.500



96 %

- Bantuan Perikanan Rp 1.588.000
- Bantuan Bibit Pertanian Rp 44.100.000
- Bantuan Obat Pertanian Rp 4.930.000
- Pengadaan Hidroponik Rp 189.078.7000
- Sarpras Pertanian Rp 7000.000
- Silpa Rp 10.990.800

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Apakah implementasi program ketahanan pangan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Sumorame ?

Penelitian Terdahulu

Hendra Dwi Putra, Andries
lionardo, Azwar agus.
(2022)

Implementasi
kebijakan dan
pemberdayaan
Masyarakat
terhadap
peningkatan
ketahanan pangan
di kota Palembang

Yulianti, Mulono
Apriyanto, Ali Azhar
(2023)

Implementasi
program aksi
Ketahanan pangan
di Kabupaten
Indragiri Hilir

Riyan Saputra (2023)

Implementasi
Proram
Pendampingan
Desa dalam
meningkatkan
ketahanan pangan.

Metode



Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif



Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, Observasi Dan Dokumentasi



Sumber Data

Data Primer dan Data Sekunder



Teknik Analisis Data

Melalui empat tahapan yakni,

- 1) Pengumpulan Data;
- 2) Reduksi data;
- 3) Penyajian data; dan
- 4) Penarikan kesimpulan



Lokasi Penelitian

Di Desa Sumorame

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis bagaimana kebijakan ketahanan pangan dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat desa. Menurut Edwards, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi jika dikaitkan dengan teori implementasi menurut Edward III sebagaimana komunikasi sudah berjalan secara maksimal dan sudah memberikan perhatian lebih terhadap target sasaran dalam proses suatu implementasi. Karena realita dilapangan sudah di

lakukan sosialisasi resmi yang diadakan pemerintah Desa Sumorame mengenai Program ketahanan pangan Kepada warga Desa Sumorame, Proses sosialisasi tersebut di laksanakan melalui Musyawarah Desa yang juga sebagai dasar dilaksanakannya program tersebut. Selanjutnya di perlukan koordinasi yang jelas, konsisten, dan dua arah, antara pemerintah Desa Sumorame dengan masyarakat khususnya para petani sehingga program ketahanan pangan di desa dapat diimplementasikan lebih efektif., serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan di Desa Sumorame.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2. Sumber daya

sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

Dari Hasil observasi dan wawancara yang sudah di lakukan pada aspek sumber daya manusia menunjukkan sudah cukup baik karena melibatkan kaur perencanaan dan kelompok tani serta kelompok Masyarakat.

Pelaksana Kegiatan Program Ketahanan Pangan Desa Sumorame

No	Nama	Jabatan
01	WARSONO	Kaur Perencanaan
02	ROBURYANI	Ketua Kelompok Tani

Selanjutnya sumber daya anggaran menunjukkan sudah terpenuhi dengan baik karena Pemerintah Desa Sumorame sudah menganggarkan sesuai regulasi yang ada yaitu sebesar 20 % dari dana Desa yang di terima oleh Desa. pada aspek sumber daya Peralatan terdapat beberapa permasalahan yang kompleks di antaranya adalah lahan pertanian yang terbatas dan sering terjadi banjir jika musim hujan Sehingga efektifitas program pada sektor pertanian kurang

maksimal. Dan untuk pengelolaan Hidroponik biaya operasionalnya terlalu tinggi sehingga warga belum bisa merasakan manfaat dari program tersebut.

Sarana prasarana Program ketahanan pangan di Desa Sumorame

NO	SARANA PRASARANA	
1	Kolam Ikan	6 Unit
2	Perlengkapan Hidroponik	44 Unit
3	Bibit Unggul	2450 Kg
4	Obat-obatan pertanian	10 kg

Sumberdaya kewenangan sudah dilaksanakan dengan baik oleh kepala Desa Sumorame yang memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan Keputusan pada saat pembagian tugas pelaksanaan program ketahanan pangan yang di ikuti perangkat Desa , Kelompok Tani dan kelompok Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3. Disposisi

Dari Hasil Observasi dan wawancara yang dilakukan jika dikaitkan dengan teori implementasi menurut Edward III bahwa disposisi dilapangan sudah terlaksana dengan baik. Kondisi Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya ketahanan pangan lebih mendukung dan berpartisipasi dalam program yang diadakan. Pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat desa dan penyuluh pertanian sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi positif masyarakat. Sikap positif dan komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat dapat meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan dan dapat mewujudkan tujuan program ketahanan pangan di desa Sumorame yang berkelanjutan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

4. Struktur Birokrasi

Dari hasil observasi dan wawancara yang sudah dilakukan, jika dikaitkan dengan teori Edward III dimana struktur birokrasi sudah dilaksanakan dengan benar khususnya pada pembagian tugas dan fungsi Aparatur Desa sudah dilaksanakan secara struktural sesuai jobdesknya masing-masing. Pemerintah Desa Sumorame sudah memperhatikan dan melaksanakan Standart Operasional Prosedur (SOP) pada Implementasi Program ketahanan pangan di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Terbukti bahwa program tersebut sudah memberikan proses atau prosedur yang tepat. Karena SOP yang baik menurut

teori Edward III ialah mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis kepada siapapun, sebab menjadi acuan dalam berlangsungnya kegiatan maupun bekerjanya implementor .



KESIMPULAN

implementasi Program ketahanan pangan di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan dengan 4 indikator yakni

- 1 Komunikasi di desa Sumorame sudah cukup optimal karena sampai sekarang sudah di laksanakan sosialisasi khusus yang diberikan oleh pemerintah desa kepada para petani dan seluruh warga melalui Rt /Rw mengenai Program Ketahanan Pangan yang akan dilaksanakan. Kedua
- 2 sumber daya manusia pada implementasi Program Ketahanan pangan sudah kompeten karena dalam pelaksanaannya melibatkan langsung kelompok tani untuk berkordinasi dan ber kolaborasi dalam menjalankan program tersebut. Sedangkan sumber daya finansial sudah dilaksanakan secara maksimal karena anggarannya sudah sesuai regulasi yang ada yaitu sebesar 20% Dana Desa . Pada sumber daya peralatan atau sarana prasarana di Desa Sumorame dalam belum cukup optimal, karena ada beberap kendala di antaranya Lahan Pertanian yang terbatas , Faktor alam dan letak geografis area pertanian di Desa Sumorame yang kurang mendukung dan penghasilan program hidrophonik kurang maksimal .

KESIMPULAN

3

Disposisi secara umum sikap dan respon dalam implementasi Program ketahanan pangan sudah cukup optimal, hal ini dapat di rasakan dari sikap positif dan komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat dapat meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan.

4

Struktur Birokrasi di Desa Sumorame sejauh ini sudah melaksanakan sesuai dengan SOP. Dengan tugas atau jobdes masing-masing serta tanggung jawab dari semua yang terlibat dalam program ketahanan pangan

REKOMENDASI

Dari keseluruhan hasil penarikan kesimpulan, peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Desa Sumorame agar lebih mengevaluasi dan perbaikan dari segi sumber daya fisik khususnya pada Pengembangan teknologi pertanian yang tepat guna untuk menekan efisiensi biaya operasional dan Komunikasi antara pemerintah daerah, petani, dan organisasi pendukung harus kuat untuk memastikan bahwa bantuan dan sumber daya yang diperlukan dapat segera di wujudkan

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Bapak Kepala Desa



Wawancara Bersama Kaur Keuangan



Wawancara Bersama Kaur Perencanaan



Wawancara Bersama Ketua Kelompok Tani

REFERENSI

- [1]. Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi,” *Lemb. Negara RI*, pp. 1–63, 2015, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5581>
- [2] Pemerintah Republik Indonesia, “Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa,” *Dinamika*, vol. 2019, no. 961,2021,[Online].Available: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/16313>
- [3] Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK 07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa,” no. 1424, 2021.
- [4] Peraturan Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014,” *Peratur. Republik Indones.*, vol., no., p., 2014, doi: 10.1145/2904081.2904088.
- [5] P. R. Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260),” *Bpk.Go.Id*, pp. 1–11, 2021, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188354/perpres-no-104-tahun-2021>
- [6] Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan,” *Peratur. Perundang-undangan*, pp. 1–12, 2002.
- [7] R. Saputra, “Implementasi Program Pendampingan Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan,” *ULIL ALBAB J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 1, no. 5, pp. 1223–1237, 2022, [Online]. Available: <http://ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/view/254%0Ahttps://ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/download/254/213>
- [8] A. Hakim, O. A. Saputra, and C. Saleh, “Policy determination in E-budgeting implementation by the government of DKI Jakarta – Indonesia,” *Int. J. Criminol. Sociol.*, vol. 10, pp. 149–167, 2021, doi: 10.6000/1929-4409.2021.10.19.
- [9] D. Putra, Hendra Duwie, “Jurnal Tanah Pilih PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DI,” vol. 2, no. 2, pp. 85–99, 2022.

REFERENSI

- [10] Y. Yulianti, M. Apriyanto, A. Azhar, and K. N. S. Fikri, “Implementasi Program Aksi Ketahanan Pangan Di Kabupaten Indragiri Hilir,” *Selodang Mayang J. Ilm. Badan Perenc. Pembang. Drh. Kabupaten Indragiri Hilir*, vol. 9, no. 1, pp. 16–24, 2023, doi: 10.47521/selodangmayang.v9i1.293.
- [11] I. muttaqien A. Straus, I Corbin, “A. Straus, I Corbin, I muttaqien (11).pdf.”
- [12] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. 2020.
- [13] M. B. dan A. M. H. Miles, “Mental health nursing is stretched to breaking point,” *Nurs. Stand.*, vol. 30, no. 25, p. 33, 2016, doi: 10.7748/ns.30.25.33.s40.
- [14] S. A. Fatma and S. Zuhri, “LMI Develops Public Speaking Skills Speaking In Public,” *Jkb J. Kabar Masy.*, vol. 1, no. 3, pp. 41–46, 2023, [Online]. Available: <https://doi.org/10.54066/jkb.v1i3.534>
- [15] A. W. Kurnia, S. Sundari, D. A. Purwanto, and U. Pertahanan, “the Implementation of National Food Reserve Policy in Emergencies At the Food Security Agency To Support State Defense,” *Manaj. Pertahanan*, vol. 6, no. 1, pp. 73–99, 2020, [Online]. Available: <http://www.fao.org/3/w3548e/w3548e00.htm>
- [16] R. Setiawan, Z. Rusli, and M. Mayarni, “Implementasi Program Ketahanan Pangan,” *FOKUS Publ. Ilm. untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Univ. Kapuas Sintang*, vol. 21, no. 1, 2023, doi: 10.51826/fokus.v21i1.723.
- [17] L. Y. P. Cecep Kurniawan, Setyawan Widyarto, “Implementasi Struktur Birokrasi Strategi Pertahanan Laut Menghadapi Ancaman di Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara,” *Strateg. Pertahanan Laut*, vol. 4, no. 1, pp. 1–18, 2018.

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO



TERIMA KASIH

